



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KESBANGPOL KAB. KUTAI KARTANEGARA



Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3 Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan bentuk **akuntabilitas** dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 23 Februari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691226 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	5
1.5 Uraian Singkat Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2021	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	26
3.2 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023	79
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Perbaikan Ke depan	88
4.3 Sumber Data Kinerja	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2023	
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2023	
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023	
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024	
MATRIK PENGUKURAN KINERJA 2023	
MATRIK RENSTRA 2016-2021	
MATRIK REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN 2023	
CASCADING KESBANGPOL 2023	
MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA KESBANGPOL	
RENCANA AKSI DAN MONEV 2023	
STRUKTUR KESBANGPOL 2023	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Tahun 2023, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Badan Kesbangpol merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri dan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, pada tahun 2023 Badan Kesbangpol melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol tahun 2023. Pencapaian kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2023 diukur melalui 4 (empat) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama dan 16 (enam belas) indicator tambahan yang diperjanjikan untuk dapat dicapai target-targetnya. Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023, dengan perhitungan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja realisasinya memenuhi target sasaran, namun terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	132%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	133%
3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	127 %
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	67,32 %
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah Jabatan	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
6	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	100%
7	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	100%
8	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	100%
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	100%
9	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	100%
10	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	100%
11	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	100%
12	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan	Capaian Output Kegiatan	97,99%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
	Potensi Utang		
13	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	97,99
		Persentase realisasi keuangan	93,28
14	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	100%
15	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	100%
16	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	100%
17	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%
18	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	100%

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun dengan beberapa catatan dan bila dilihat dari capaian output dengan realiasi capaian mencapai 97,99%, capaian pada tahun 2023 terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95,23% hal ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol.

Adapun Kegagalan pada beberapa indikator tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh buruknya kinerja aparatur Badan Kesbangpol, namun lebih disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan yang ada.
2. Harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan
3. Kelengkapan administrasi barang yang masih belum lengkap
4. Pihak kecamatan dan desa/kelurahan tidak memiliki data tentang nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dimana kesemuanya merupakan sasaran utama sosialisasi, dengan harapan dari tokoh-tokoh ini bisa menyebarkan kemasyarakatan tentang pesan/materi/aturan yang disampaikan.
5. Pelaksanaan Operasi Bersinar (Bersih Sindikat Narkoba) dari kepolisian yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penyakit masyarakat khususnya kasus narkoba
6. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar
8. Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan

Selain kegagalan tersebut, masih terdapat keberhasilan kinerja yaitu meningkatnya nilai predikat akuntabilitas Badan Kesbangpol, walaupun tidak mencapai target nilai yang ditetapkan, namun sudah mencapai predikat baik (A) serta situasi daerah yang kondusif dari konflik sosial masyarakat

Disamping capaian kinerja, realisasi anggaran Badan Kesbangpol sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 60.986.269.805,00,- atau 93,28% dari Pagu anggaran sebesar Rp 65.381.761.672,00,- dan hal ini menunjukkan realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 9,42 % dibandingkan tahun 2022 sebesar 83,86%.

Hasil capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 tersebut akan dijadikan sumber informasi dan referensi serta media evaluasi yang efektif, yang berfungsi sebagai alat kendali kinerja seluruh jajaran aparaturnya Badan Kesbangpol, bagi upaya

perbaikan dan optimalisasi kinerja Badan Kesbangpol, yang selanjutnya dapat mendukung dalam rangka mewujudkan agenda reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah selanjutnya tahun 2021 – 2026.

Demikian gambaran pelaksanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 yang secara lengkap capaian diatas akan diuraikan dalam dokumen ini. Capaian tersebut menggambarkan komitmen jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya diperlukan kesinambungan dan komitmen serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri dan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan manajerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pd tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur

			5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja
2	Situasi keamanan daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1.Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3.Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
3	Masih rendahnya pengamalan idiologi dan wawasan kebangsaan	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan 2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat
4	Menurunnya kualitas demokrasi di daerah	Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat	1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 3. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 4. Masih terdapat parpol dan organisasi yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol
- a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.

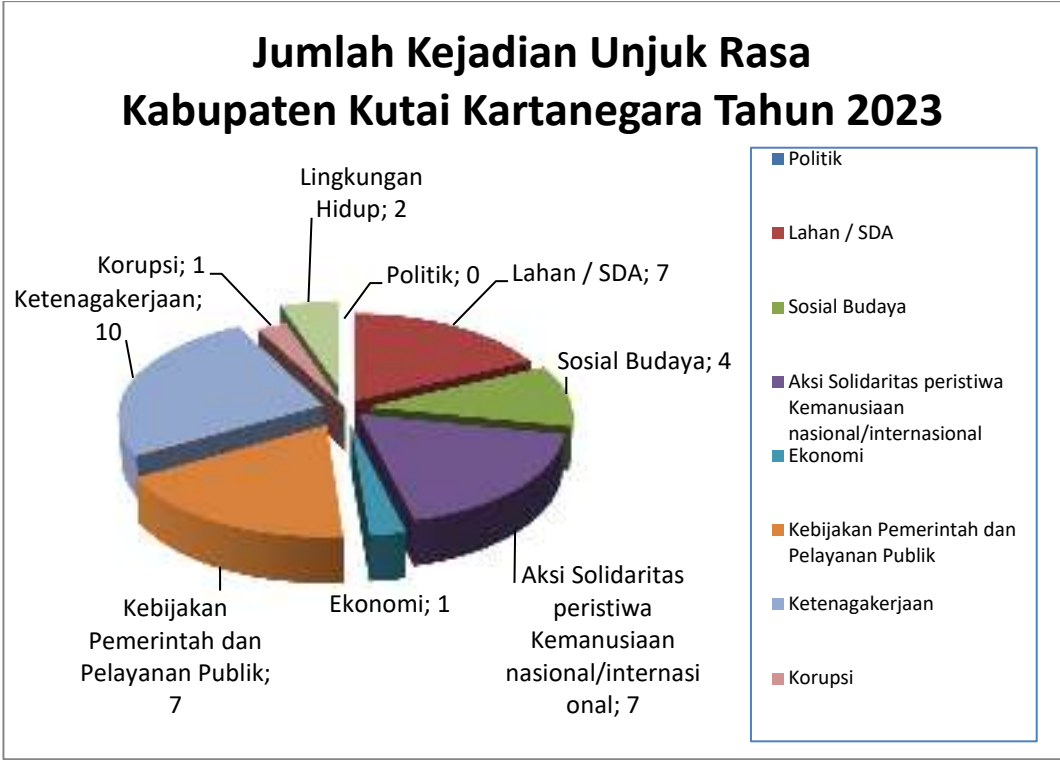
b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaaa sarana dan prasarana

c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol

d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2018	2019	2020	2021	2022
B	BB	BB	A	AA

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat



3. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023
1	Narkoba	224	178	239
2	Pembunuhan	3	3	-
3	Kejahatan Seksual	1	3	2
4	Penganiayaan	22	32	15
5	Pencurian	17	36	16
6	Eksplorasi Anak Bawah Umur	24	25	15
7	Premanisme	0	5	6
	JUMLAH	291	282	293

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar tahun 2018 – 2023							
NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14
2.	OKP	-	-	-	-	4	
3.	LSM	-	2	-	2	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015-2020					
INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpre 81,24	Pilbup 57,00

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang muncul, diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- C. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksesi dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- D. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara.
- E. Penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, tugas dan fungsi, yaitu :

1. Pemberian dukungan administrasi di seluruh unit kerja Badan Kesbangpol meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, pengelenggaraan organisasi dan tata laksana;
2. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat;
3. Menjadi leading sektor dalam tim terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat Forkopimda Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelijen di kecamatan dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di daerah;
5. Pelayanan terhadap pembuatan surat ijin penelitian dan surat keterangan tidak terlibat dalam organisasi yang mengkhianati NKRI (untuk persyaratan Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa);
6. Memfasilitasi pemberantasan penyakit masyarakat terutama yang berkaitan dengan NARKOBA;
7. Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu setiap tahunnya;
8. Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik;

9. Badan Kesbangpol juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan melalui kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas dan LSM yang baru dan pembaruan SKT yang sudah habis masa berlakunya;
10. Memberikan hasil analisis dalam peningkatan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Struktur organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Laporan ini.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan sistematis, sarana prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol telah mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2021 – 2026 telah mengalami beberapa perubahan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Secara ringkas substansi Renstra Badan Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara
Yang Sejahtera dan Berbahagia”***

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol
		2. Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang diselesaikan

2.1.3 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam urusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. MeningkatnyaTransparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	2.Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak
	3. Meningkatnya	Persentase aparatur dan

	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas
	4. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

STRATEGI (ARAH DAN KEBIJAKAN OPD)

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat
	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol
	Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

2.1.5 Program

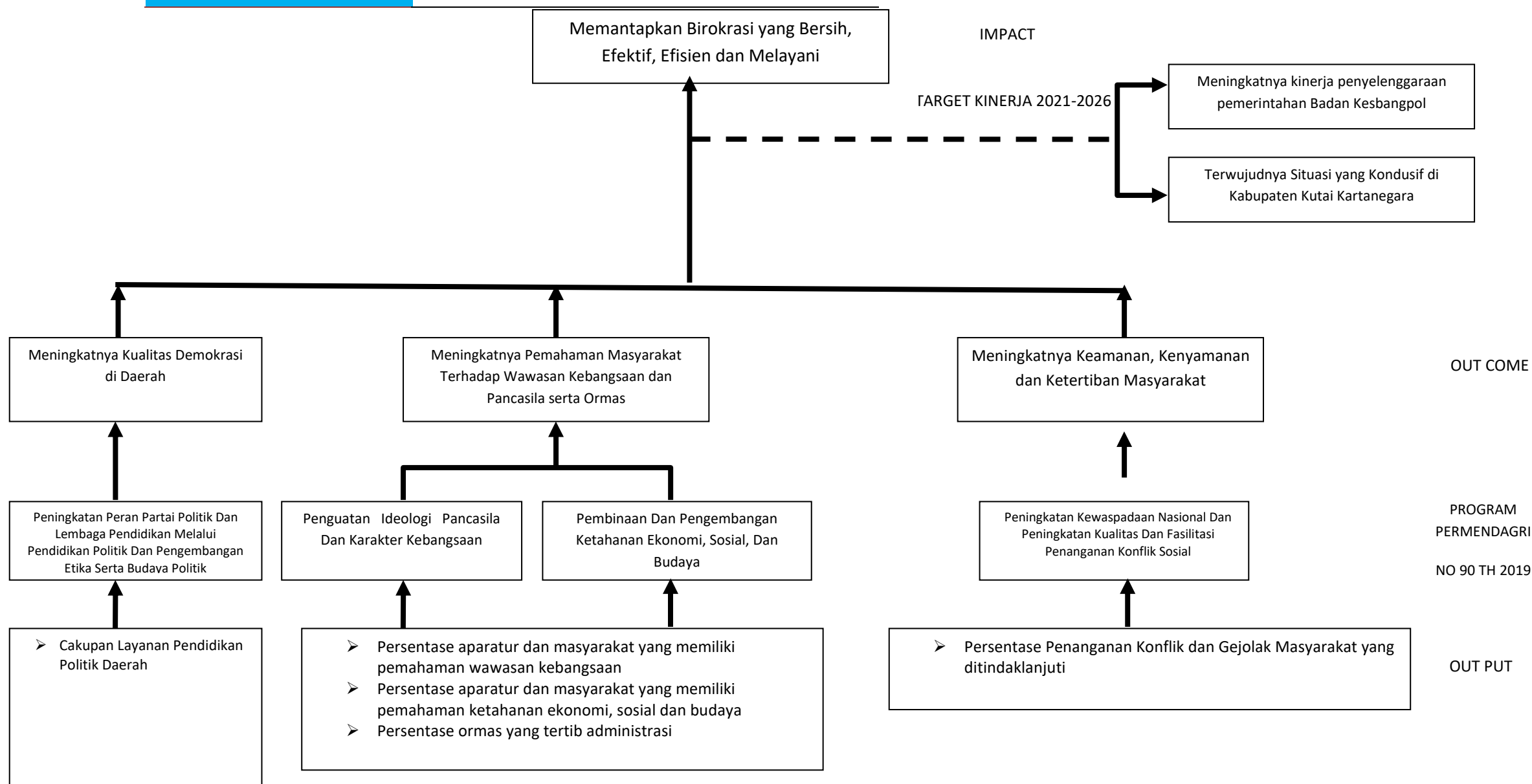
Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1. MeningkatnyaTransparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	a. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

		b. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
4. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	a. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		b. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah hasil atau dampak yang diharapkan akan tercapai dalam masyarakat, berikut diagram impact Badan Kesbangpol :



2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2023 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	63,50
2	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	25 kejadian
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	2,99%
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	4,5%

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut Badan Kesbangpol Tahun 2023 disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol sebagai intrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan LKjIP Badan Kesbangpol Tahun 2023.

2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Kesbangpol
2	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Kesbangpol
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Kesbangpol dan Komisi Pemilihan Umum

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai	63,50	Nilai PMPRB
Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Kejadian	25	Jumlah konflik dan gejolak yang terjadi
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap demokrasi	Persen	4,5	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang paham Terhadap Demokrasi dibagi Jumlah penduduk yang memenuhi syarat/yang masuk dalam DPT dikali 100
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase Aparatur dan Masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan pancasila serta ormas	Persen	2,99	Jumlah masyarakat dan aparatur yang paham wasbang dan pancasila serta ormas dibagi Jumlah masyarakat kukar yang memenuhi syarat/DPT dikali 100
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi Yang di Tindak Lanjuti	Persen	100	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan dikali 100
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	Jumlah pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan BMD dibagi Jumlah BMD di Pengguna Barang di kali 100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Barang Milik Daerah				
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	Jumlah pengelolaan pengadaan dibagi jumlah pengadaan dikali 100
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Jumlah Pejabat yang mengisi LHKPN dibagi jumlah pejabat dikali 100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	Jumlah ASN yang mengisi LHKASN dibagi jumlah ASN dikali 100
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Predikat kearsipan berdasarkan hasil evaluasi
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	persen	100	Jumlah data terisi dibagi jumlah seluruh elemen data yang harus diisi
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	Jumlah inovasi yang dibuat
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	persen	100	Jumlah capaian output kegiatan dibagi Jumlah output kegiatan
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	persen	100	Jumlah realisasi fisik dibagi Jumlah target fisik
	Persentase realisasi keuangan	persen	100	Jumlah realisasi keuangan dibagi Jumlah pagu anggaran
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	laporan	2	Ketepatan Waktu Pelaporan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
perangkat daerahnya				
Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	dokumen	1	Jumlah dokumen reuiu IKU
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	kegiatan	4	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	persen	100	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN yang wajib mengikuti pengembangan kompetensi
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	poin	100	Jumlah poin KTR

Jumlah Anggaran :

1.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
:
11.499.153.606
2.
Program Penguatan Ideologi Pancasila
Dan Karakter Kebangsaan
:
1.400.000.000
3.
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
:
7.288.747.600
4.
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
:
300.000.000
5.
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
:
3.652.400.000
6.
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
:
2.623.840.000
- JUMLAH**
:
26.764.141.206

Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Tahun 2022	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai	63,25	63,50	64,50
2.	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Kejadian	28	25	17
3.	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Persen	2,68	2,99	3,92
4.	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Persen	4,4	4,5	5,71

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 sebesar 96,83 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	63,50	41,85	67,32%	Sedang
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	25	14	132%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	2,99	3,99	133,44%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	4,5	5,71	126,89%	Sangat Tinggi
Rata-Rata				96,83%	Sangat Tinggi

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan gejolak masyarakat dan kejadian konflik pada tahun 2023 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan sutuasi di Kutai Kartanegara kondusif
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	2,19%	123%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,21%	1,77%	146%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target.
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62 %	14,76 %	127%	kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	9,9%	9,8%	98,99%	Dari target 25 ormas telah terpenuhinya 21 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Penunjang Pemerintah Kabupaten/Kota	Urusan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 nilai	95,20 nilai	109	Nilai SAKIP hasil reviu Tahun 2022

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023, dengan perhitungan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja realisasinya melebihi target sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi target sasaran, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun, capaian pada tahun 2023 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022

Dalam hal pencapaian output program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 97,99 % dan realisasi keuangan sebesar 93,28 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian target renja dan renstra yang tercapai, tidak tercapai dan melebihi target serta faktor-faktor penyebab dan tindak lanjut terhadap capaian target program dan kegiatan pada tahun 2023, secara keseluruhan disampaikan sebagai berikut :

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai	87	95,20	109	Adanya perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya	Reviu terhadap SOP pengumpulan data kinerja
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	20	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	900	900	100	Terdapat ASN yang pensiun dan meninggal serta pindah tugas	Kepatuhan SOP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	Tertibnya pelaporan data dan kepangkatan ASN Kesbangpol	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	195	189	96,92	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	25	33,33	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	100	Tertibnya pelaksanaan layanan	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	29	29	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	19	19	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	5	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	600	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.220	2.220	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	170	170	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	85	85	Kelengkapan administrasi barang yang masih belum lengkap	Proses pemenuhan kelengkapan administrasi barang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	30	15	50	Sebagian kendaraan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional kendaraan secara berkala
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	40	3	7,50	Kelengkapan surat kendaraan untuk pengurusan belum ditemukan	Pengusulan kemudahan administrasi pada Samsat untuk kendaraan dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	43	35	81,40	Sebagian peralatan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional peralatan secara berkala
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persen	1,78	2,19	123	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh agama serta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersama FPK dan FKUB
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.800	1.800	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	400	400	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
III	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI		Persen	11,62	14,76	127	Kegiatan Pendidikan Politik	Melakukan kerjasama dengan partai politik dan lembaga

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra	pendidikan dalam peningkatan pendidikan politik kepada aparatur dan masyarakat
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5.400	5.400	100	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta serta lokasi pelaksanaan bisa menjangkau daerah pedesaan dan pemukiman perusahaan
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	30	30	100	Parpol telah memenuhi kelengkapan administrasi dan telah menyelesaikan pertanggung jawaban	Peningkatan kapasitas dan pemahaman partai politik terhadap peningkatan pendidikan politik
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	48	28	58,33	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan perkembangan politik
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persen	9,9	9,8	99	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang	Melakukan sosialisasi peratura perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
							berlaku	
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	20	20	100	Dokumen sesuai dengan jumlah dokumen ormas yang terregistrasi	Diperlukan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan keberadaan ormas
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	75	60	80	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persen	1,21	1,77	146	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparaturnya telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta Tes Urine terhadap ASN dan Masyarakat serta pembentukan Desa dan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di 11 Desa dan 2 Sekolah
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Dok/Tri	5	5	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	3.000	2.546	84,87	Sikap apatis masyarakat terhadap ketahanan ekososbud dan belum menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pemahaman ketahanan ekososbud kepada aparaturnya dan masyarakat
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	22	22	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan ketahanan ekososbud
VI	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persen	100	100	100	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Telah dilakukan upaya melalui pendidikan dan pelatihan dasar deteksi dini dan pelaporan serta monitoring deteksi dini terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah serta penyusunan dokumen

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
								ketahanan ekonomi
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	500	500	100	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Diperlukan analisis yang lebih detail terhadap hasil deteksi dini yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan selanjutnya
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	35	70	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forkopimda	Peningkatan jalin koordinasi antar instansi vertikal

Dalam tahun 2023 pencapaian program kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel diatas, tentunya memiliki implikasi terhadap target capaian pada rencana strategis Badan Kesbangpol, adapun implikasi yang timbul terhadap capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari seluruh program hanya terdapat 1 program yang tidak mencapai target, sehingga akan menghambat pencapaian pada akhir renstra
2. Pada program lainnya capaian yang melebihi target akan dilakukan evaluasi lagi terkait perubahan atau penambahan target kinerja
3. Secara keseluruhan pada capaian renstra masih baik, karena masih berada pada tahun pertama dan pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya pencapaian target
4. Diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan satuan target

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja tahun 2023 :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Terdapat penyesuaian anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang terdapat pada program ini, penyesuaian dilakukan untuk melakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan lain dalam rangka memenuhi target kinerja.

**2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN**

Pada program ini dilakukan pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan Jejaring Panca Mandala dan persiapan Paskibraka serta pemberian hibah uang kepada ormas Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)

**3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Pagu kegiatan ini mengalami pergeseran dan penambahan terkait untuk keperluan Fasilitasi KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan workshop teknis penyelenggaran pemilu tingkat kecamatan tahapan pemilu 2024 dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara serta hibah kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah tahun 2024

**4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA**

Pada program ini dilakukan pergeseran pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan fasilitasi Bawaslu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis dan pelaksanaan rakor FKUB se-Kaltim serta pembelian test kit narkoba.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja untuk keperluan pelaksanaan hari bela negara 2023 dan Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota FKDM kabupaten kutai kartanegara serta sosialisasi pencegahan radikalisme bersama MUI dan Kemenag

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 di setiap indikator kinerja :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran
Strategis I

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	77,83	86,16	95,20

Dari indikator tersebut diatas, bahwa setiap tahun hasil capaian mengalami peningkatan, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, berikut analisis dari indikator tersebut :

a. **Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu OPD dan memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik, namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 jenis	29 jenis	100,00%
Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40 unit	3 unit	7,50%
Sosialisasi Peraturan Perundang-	75 orang	25 orang	33,33%

Undangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 unit	35 unit	81,40%

Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, Cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masih terdapat sisa perlengkapan yang tidak digunakan.
2. Dalam Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran.
3. Dalam Penataan Arsip Perangkat Daerah, terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak terealisasi.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada tahun 2023 telah terpenuhi. Dan pada tahun 2024 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Pengadaan dan Pemeliharaan BMD

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	6	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Kaca	2	2013	Baik
6	Penghancur Kertas	2	2014	Baik
7	Papant Tulis	1	2013	Baik
8	AC	30	2014	Baik
9	Televisi	14	2013	Baik
10	Sound System	1	2013	Baik
11	Dispenser	8	2013	Baik
12	CCTV	4	2013	Baik
13	PC	20	2014	Baik
14	Printer	20	2014	Baik

15	UPS	10	2014	Baik
----	-----	----	------	------

Sarana dan prasarana yang digunakan aparatur pada tahun 2023 tidak banyak mengalami perubahan karena Pada tahun 2023 pelaksanaan pengadaan keperluan Badan Kesbangpol telah terpenuhi.

c. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan BMD

Pengelolaan aset BMD dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaanya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketepatan pelaporan BMD

Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian aset yang disampaikan ke Bagian Umum.

b. Ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan BMD sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Laporan BMD yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

- 1. 2 (dua) dokumen Laporan BMD Semesteran

2. 1 (satu) dokumen Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2022 sebesar 100%, dan di tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

d. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana (cash flow)

Pada awal tahun anggaran Badan Kesbangpol mendapat Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp. 350.000.000,-. Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga mencapai batas minimum 30% dari pagu UP untuk kemudian dilakukan revolving atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.

b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Laporan Keuangan yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang

ditetapkan, terdiri dari :

- 12 (dua belas) dokumen Laporan Keuangan Bulanan
- 4 (empat) dokumen Laporan Keuangan Triwulan
- 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
- 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2022 sebesar 100%, dan di tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

e. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Kesbangpol

Dalam sebuah penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen turunan dari perencanaan 5 tahunan ke perencanaan 1 tahun, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja

Untuk menuju konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah ditempuh langkah konkrit sebagai berikut :

a. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2023 dan juga untuk tahun 2024 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga aspirasi yang masuk telah ditampung dan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan OPD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan capaian kinerja untuk LKjIP pada tahun 2023 telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan reuiu oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk setiap bulan kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Pantau.

Sampai dengan akhir tahun 2023 telah dibuat RENJA 2024, LKjIP 2022, LPPD 2022 dan laporan capaian kinerja bulanan tahun 2023 baik secara manual baik melalui aplikasi E – PANTAU dan telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2023 telah

dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam tahun 2023 terdapat 31 kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2022 sebesar 100%, dan di tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

Tujuan 2 :

Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari indikator tersebut :

Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti

Untuk capaian indikator Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak

Masyarakat yang ditindaklanjuti, Badan Kesbangpol telah berupaya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Data Gangguan dan Konflik

Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2023 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2022.

Pada tahun 2023 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 26 kali aksi, sedangkan pada tahun 2022 aksi unjukrasa sebanyak 40 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Kebijakan Pemerintah, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penyalanan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2023.



Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik	1							1					2
2	Lahan / SDA	1			1				1			1	2	6
3	Sosial Budaya	1			1	1			1		1			5
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional		1			1			1					3
5	Ekonomi	1												1
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik							2	1					3
7	Ketenagakerjaan							1						1
8	Korupsi			1			1				1			3
9	Lingkungan Hidup		1				1							2
Jumlah Unjuk Rasa		4	2	1	2	2	2	3	5	0	2	1	2	26

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)	1		1	1	1	1	1	3					9
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masyarakat)										1			1
3	Ormas / LSM	1	1	1			1	1	1		1			7
4	Elemen Masyarakat	2	1			1						1	2	7
5	Karyawan / Sarikat Pekerja							1	2					2
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa		4	2	2	1	2	2	3	6	0	2	1	2	26

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah													-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha						1							1
3	Pemogokan Kerja													-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh													
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat													
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

A. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta perlu peningkatan peran masyarakat untuk lebih aktif.

Permasalahan ini memerlukan suatu penanganan terpadu dan jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur. Guna mendukung hal tersebut, dibutuhkan penyediaan data dan informasi aktual serta akurat. Sehingga diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sinergis.

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari pemerintah daerah yang sebagai leading sektor dalam koordinasi dalam menjaga keamanan di daerah. Hal ini dengan dibentuknya wadah/forum yang dapat mensinergikan seluruh kebijakan strategis berkenaan menjaga keamanan didaerah yaitu dengan dibentuknya:

1. Nama Forum

:

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dasar Hukum

:

1.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

4.

Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah.

5.

Permendagri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Asing di daerah.

6.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1514/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

9.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Tujuan

:

1.

Sebagai wadah/forum dalam pertukaran data dan informasi Intelijen sehingga dapat diolah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan

Daerah (sebagai User) untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menjaga kondusifitas daerah.

2. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pertukarkan data dan informasi tentang permasalahan yang bisa menjadi pemicu permasalahan konflik dimasing-masing OPD kemudian secara bersama menganalisa data dengan informasi intelijen untuk dihasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan strategis.
3. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai institusi lintas sektoral yang melibatkan banyak orang dari unsur intelijen.
4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkompilasi dan mengkoordinasi informasi bidangIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan, Keamanan dan KetertibanMasyarakat(IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang menjadi hambatan, gangguan dan acaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik dalam negeri di daerah.
5. Melakukan kompilasi tukar-menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan prefentif maupun refresif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

Keanggotaan

- : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua 1)
2. Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 2)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 3)
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 1)
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 9. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 10. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
- 13. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0906/TGR;
- 14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;
- 15. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
- 16. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 20. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 21. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 23. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Nama Forum	: Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
Dasar Hukum	:1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- 4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tertanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 367/SK-BUP/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Tujuan
- :1. Mengkoordinasikan,mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
2. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
5. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
6. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

- Keanggotaan
- : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua)
2. Wakil BupatiKutai Kartanegara (Wakil Ketua 1);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 2);
4. Kapolres Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 3);
5. Dandim 0906/TGR (Wakil Ketua 4);
6. Kajari Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 5);
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris);
8. Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara (Wakil Sekretaris 1);

9. Perwira Seksi Operasi Kodim 0906/TGR (Wakil Sekretaris 2);
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
17. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Kepala Sub Bidang Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kegiatan – Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk melalui Surat Keputusan No. 370/SK-BUP/HK/2021

tanggal 7 September 2021 yang bertujuan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pertukaran informasi kewaspadaan secara dini.

Pendanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
Jenis Kegiatan	: 1. Pemantauan deteksi (AGHT) di 18 Kecamatan. 2. Melaksanakan Kegiatan fungsi intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan atas sebuah kasus. 3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah. 4. Pembuatan analisis dan rekomendasi (problem solving) atas permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah untuk disampaikan kepada pimpinan daerah untuk diambil kebijakan lebih lanjut.

5. Pembentukan Anggota Jaring Kominda di setiap Kecamatan sebagai pengumpul bahan keterangan (pulbaket) informasi, agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat (temu cepat, lapor cepat)

Koordinasi yang dilakukan oleh kominda dilakukan setiap bulan dan minimal setiap tiga bulan, untuk membahas isu-isu strategis atas informasi yang disampaikan oleh Anggota Jaring Agen Kominda di Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil Rapat Kominda disusun sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) atas isu-isu aktual dan strategis.

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan diterbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 197/SK-BUP/HK/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
- e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
- g. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Untuk keterpaduan aksi pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas tercapainya target maka kerangka kerja dari Tim Terpadu yang berisikan tahapan :

Pertama, Pembahasan Personalia Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan pelibatan SKPD dan instansi vertikal di daerah yang terkait.

Kedua, Penetapan pembagian tugas SKPD sebagai dalam kegiatan :

- 1. Pencegahan Konflik;
- 2. Penghentian / Penyelesaian Konflik
- 3. Pemulihan Pasca Konflik.

Ketiga, Penyusunan dan Pembahasan Rencana Aksi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan penetapan Instansi Vertikal/ SKPD yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi.

RENCANA AKSI TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

A. PENCEGAHAN

1. Konflik Sosial

a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter (3 RA)

b. SARA (2 RA)

c. Politik (1 RA)

d. Ekonomi / Industrial (1 RA)

2. Dukungan Pelaporan Penanganan Pandemi Covid-19 (1 RA)

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME

1. Penghentian Konflik / Terorisme (4 RA)

2. Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme

a. Sebelum Tahun 2023 (1 RA)

b. Sejak Tahun 2023 (2 RA)

C. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM

a. Sebelum Tahun 2023 (2 RA)

b. Sejak Tahun 2023 (2 RA)

D. FASILITASI FORKOPIMDA, KEWASPADAAN DINI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 (1 RA)

E. PELAPORAN PENANGANAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 (1 RA)

Pada tahun 2013 – 2014 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu disampaikan kepada Kemenko Polhukam / Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring UKP4 seluruh data diupload (entry data) melalui website Serambi UKP4 : <http://serambi.ukp.go.id>. Dengan masa pelaporan B.03, B.06, B.09 dan B.12.

Mulai tahun 2015 hingga tahun 2023 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dilaporkan secara manual kepada Sekretariat Tim Terpadu Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan menyerahkan laporan berupa softcopy dan hardcopy data pendukung setiap rencana aksi yang dilaksanakan dengan masa pelaporan B04, B08 dan B12.

Masa Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Periode Pelaporan	Masa Pelaporan	Evaluasi Timdu Pusat
Periode B-04	27 April – 6 Mei 2023	5 Juni 2023
Periode B-08	27 Ags – 6 Okt 2023	8 September 2023
Periode B-12	27 Des – 6 Jan 2023	10 Januari 2024

Pada Tahun 2023 pelaporan progress capaian pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dilaporkan melalui sistem penyimpanan data digital Google Drive yang dibangun oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Semua data pendukung capaian target pelaksanaan rencana aksi diupload melalui akun : timdu_Kukar@gmail.com pada penyimpanan data digital Google Drive Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Jenis Kegiatan	: 1. Pemantauan Pemantauan Gangguan Keamanan di 18 Kecamatan. 2. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian konflik sosial dengan SKPD yang menjadi leading sektor terkait penyebab kejadian konflik. 3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah. 4. Mensinergikan seluruh kegiatan rencana aksi kepada Instansi Vertikal di daerah dan SKPD terkait sebagai langkah memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang muncul. 5. Melaporkan progres capaian pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di daerah sangat sulit, karena output dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuran realisasi kegiatan kominda adalah sejauhmana fungsi dan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan cegah dini permasalahan-

permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2023 :

**Isu Strategis dan Permasalahan Aktul
berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini**

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
Ideologi	1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i	Tenggarong	- Jumlah pengikut ± 70-80 orang - Terjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman identitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah.
	2. Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras "Khilafatul Muslimin"	Jahab, Tenggarong	Jumlah pengikut ± 20-50 orang
	3. Keberadaan Faham Aliran Syiah	Tenggarong	- Jumlah pengikut ± 40-100 orang - Telah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI" - Pada tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara. - Untuk diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi.
Politik	Suksesi Pimpinan dan	Kabupaten Kutai	Adanya upaya menguasai

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
	pengurus Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yangmana banyak kepentingan agenda politik Daerah maupun agenda kepemimpinan Nasional menghadapi Pemilu 2024	Kartanegara	pucuk pimpinan Partai Politik di Daerah dalam rangka mengamankan agenda politik pada pemilihan Bupati dan Gubernur. Membangun kekuatan untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2024.
Ekonomi	1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi.	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara	- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK
	2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit	
	3. Gesekan antar warga dengan perusahaan pemanfaatan koridor batubara (eks Tambang)	Kecamatan Lokasi Perusahaan BatubaraKoridor	- Penggunaan jalan umum untuk kegiatan houling menuju stock file yang meresahkan masyarakat karena jalan umum menjadi rusak - Meningkatnya kejadian banjir dikala hujan
Sosial Budaya	Ormas berlatar belakang Kedaerahan	18 Kecamatan	- Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan konflik - Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/pengusaha untuk mengintimidasi pihak lain - Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan
Hankam	Penyebaran faham radikal dan terorisme	Kecamatan di daerah Pesisir	- Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana tahun 2002 - Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar tahun 2011 - Simpatisan kelompok radikal kanan
		Tenggarong, Loa Duri dan Loa Janan	Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) narapidana teroris yang akan berakhir masa

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
			pidananya dan akan kembali kepada masyarakat, sehingga perlun pengawasan dari pihak terkait. Adanya kemungkinan sel-sel pengikut Jamaah Asharut Daulah yang terus hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara

b. Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam, Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2023 :

NO.	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
1	Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong membangun pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al – Ukhuwah Islamiyah, dimana Ponpes ini tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara, hal ini yang menjadikan alasan bagi warga untuk menolak keberadaan Ponpes ini, dimana Ponpes ini merupakan lembaga pendidikan sayap dari Kelompok Khilafatul Muslimin yang mengusung sistem Kekhaliifahan dan tidak	1	1. Melakukan koordinasi dengan kelurahan Jahab untuk melakukan pendataan 2. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual. 3. Mendorong Kantor Kemenag Kukar mela kukan pembinaan dan proses legalitas perizinan Pondok Pesantren. 4. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini pada 6-2-2022 5. Rapat Penangan Konflik Sosial pada 14-2-2023 yang dipimpin Asisten I 6. Rapat Penangan Konflik Sosial pada 17-2-2023 di Ruang Sekda

	mengakui pemerintah.		
2	Konflik Lahan ahli waris A.P. Sosro Negoro dengan PT. MHU aksi penutupan jalan houling PT. Multi Harapan Utama oleh ahli waris A.P. Sosro Negoro, meminta konpensasi atas lahan yang digunakan oleh PT. MHU dengan klaim lahan seluas 1,300 meter.(09/01/2023) Permasalahan yang sudah berjalan selama 9 tahun ini, sejatinya sudah mendapat angin segar dari pihak-pihak terkait salah satunya dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ini pada tahun 2019 yang mengintruksikan pihak perusahaan bersama ahli waris dapat bekerja sama. Namun hingga saat ini pihak ahli waris justru tidak mendapatkan apa-apa. Dari data terdahulu sejatinya kepemilikan lahan seluas 105.000 hektar yang diakui oleh para ahli waris pada tahun 1899 dan ditulis langsung oleh Adji Muhammad Sultan Sulaiman. Hal ini juga diakui oleh Mentri Dalam Negeri Pada Tanggal 30 Juni 1977.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik jalan aksi penutupan jalan houling. 2. mendorong dilakukannya negoisasi untuk membuka jalan agar perusahaan kembali bisa beroperasi. 3. melakukan koordinasi untuk meneruskan tuntutan kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
3	Penghentian Kegiatan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) di STS Muara Berau oleh Himpunan Nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Muara Badak Kelompok nelayan meminta PT PTB akan menghentikan kegiatan karena PT. PTB tidak memiliki Dokumen perijinan amdal floating crane PT. PTB. Nelayan menuntut PT. PTB dan memberikan ganti rugi dan CSR kepada nelayan	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik jalan aksi penghentian operasional PT. PTB. 2. mendorong dilakukannya negoisasi antara kelompok nelayan dan PT. PTB. 3. melakukan koordinasi untuk meneruskan tuntutan kepada pihak terkait 4. meminta pihak kecamatan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak (19-1-2023) 5.Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

4.	Penanganan Konflik warga Muara Badak Ulu dengan PT. Sawit Unggul Agro Niaga (SUAN) terkait dugaan adanya pencemaran lingkungan milik warga Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 11.00 pertemuan/Mediasi di Kantor PT.SUAN Camat Muara Badak Arpan S,Sos, Kasi trantib Kantor Camat (Nursidik SH), Dan Ramil Muara Badak (Kapten Rukito), Mewakili Kapolsek (Bpk Iptu Lamser L), Aipda Kukuh DK (Kanit Intelkam Polsek Muara Badak) BLHD Kabupaten Kukar (Pramu Wisnu), Kepala Desa Muara Badak(Ruslan E.). Selajutnya di adakan pertemuan/Mediasi di Kantor PT.SUAN Setelah Itu Kelapangan bersama sama Tim dari DLHD Bersama Muspika Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar untuk menentukan ada pencemaran atau tidak sampai pengambilan Titik Koordinat Tanah yang dianggap kena pencemaran	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik 2. mendorong dilakukannya mediasi antara kelompok warga dan PT. SUAN. 3. meminta Dinas Lingkungan Hidup Daerah, untuk melakukan pengecakan lapangan, mengenai titik koordinat lokasi dukan pencemaran
5	Konflik Penolakan Tambang Ilegal di loa Kulu (Desa Rempanga) yang sempai terjadi pertikaian antar warga dan Preman tambang batubara ilegal Daniel Mahendra Yuniar, 41 tahun, berdiskusi bersama 18 warga. Pertemuan di antara rintik hujan itu menghasilkan keputusan penting. Mereka akan memblokade jalur truk angkutan batu bara (hauling). Malam itu juga. Daniel dan warga sudah jemu dengan dampak hauling bagi permukiman. 1 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, jalur angkut batu bara di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, akhirnya ditutup. Warga memarkir sebuah mobil putih bernomor polisi KT 1077 CZ di tengah jalan. Akses menuju tempat penumpukan (stock pile) dan pemuatan (loading) batu bara di tepi Sungai Mahakam terkunci. Belasan dump truck bermuatan batu bara yang diduga diangkut dari tambang ilegal akhirnya tak bergerak.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan pengamanan dan melokalisi tempat perkara untuk mengantisipasi konflik berlanjut. 2. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	Tiba-tiba, seorang pria gempal yang mengenakan kaus hitam berteriak. Ia memukul kendaraan yang tadi digunakan untuk menutup jalan. Tak lama kemudian, pria tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan berusaha menikam seseorang yang tak jauh darinya. beruntung warga cepat melarikan diri		
6	Aksi protes warga RT. 16 Desa Prangat Selatan dan RT 16 Sambera Baru kepada pihak PHSS terkait Kegiatan project pemasangan pipa flow Line. Warga protes PHSS terkait Kegiatan project pemasangan pipa flow Line tipe 6" yang dikerjakan oleh PT. PTM (Kontraktor PHSS). Dimana jaringan pipa menghalangi akses menuju mushola. Selasa tanggal 9 Mei 2023, pukul 09.00 Wita menghentikan pekerjaan pemasangan pipa tersebut.	1	melakukan koordinasi dan meminta kepada pemerintah kecamatan, desa dibantu Babinnsa dan Babhinkamtibmas untuk mengamankan keadaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Serta agar warga pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam mencari solusi yang terbaik.
7.	Sengketa Lahan di Wilayah Kilo Meter 27 Antara Sdr Lasade Cs dengan Sdr Gazali Cs. Masing-masing pihak mengklaim lahan garapan dengan lokasi terletak di Wilayah Kilo Meter 27 Blok D dan Blok E. Informasi adanya sengketa lahan diperoleh dari pihak kecamatan, sehingga Pemerintah Kabupaten meminta agar Pemeritah Kecamatan bersama pihak keamanan untuk memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk menghindari konflik sosial. sehingga Pada Senin, 29 Mei 2023 bertempat di Polsek Marangkayu dilaksanakan fasilitasi penanganan Sengketa Lahan di Wilayah Kilo Meter 27 Antara Sdr Lasade Cs dengan Sdr Gazali Cs. yang dihadiri camat Marangkayu, Kapolsek marangkayu, Danposramil marangkayu, Kasi Pemerintahan Kecamatan marangkayu dan kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan : 1. Masing-masing pihak sepakat belum mengetahui tapal batas lahan yang digarap yang menjadi obyek	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga. 2. mendorong kepada kepala desa dan lembaga-lembaga desa serta pihak kecamatan untuk terus melakukan pendekatan dan mendorong dilakukan mediasi, tidak melakukan penguasaan atau tindakan yang bisa memacing terjadinya konflik. 3. melakukan koordinasi kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	permasalahan 2. Disepakati akan dilakukan pengukuran tapal batas lahan garapan oleh masing² pihak yang terletak di Blok D dan Blok E yang menjadi obyek permasalahan 3. Disepakati akan dilakukan pengukuran lahan yang menjadi obyek permasalahan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Santan Ulu.		
8	Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Desa Loa Duri Ilir Terjadi penolakan warga RT.11 dan RT.26 desa Loa Kulu Ilir Kecamatan Loa Janan atas pembangunan Gereja HKBP (saat ini dalam proses pembangunan), dimana warga menganggap pembangunan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga. 2. mendorong kepada kepala desa dan lembaga-lembaga desa untuk melakukan mediasi. 3. melakukan koordinasi kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
9	Aliansi Masyarakat di Samboja Lakukan Aksi Penutupan Akses Jalan Pertambangan Aliansi Masyarakat Bersatu di Kecamatan Samboja Barat unjuk rasa kepada perusahaan Lembuswana Perkasa (LP) dan PT. Ryan Eka Pratama (PT. REP). untuk melakukan progres penutupan lubang bekas tambang dan sengketa lahan yang belum tuntas dengan permintaan masyarakat. Sebelumnya, telah dilakukan mediasi pertemuan antara masyarakat terdampak dengan pihak perusahaan untuk menemukan win win solution, dan dituangkanlah dalam bentuk berita acara. Namun, dari berita acara tersebut pihak perusahaan belum juga melakukan progres komitmen yang telah disepakati bersama. Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Bukit Merdeka (APLH-BM) Yasir Den Has mengatakan aksi yang terjadi pada Senin (12 Juni 2023) merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam merealisasikan penutupan bekas lubang tambang yang	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga dengan pekerja. 2. melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	berdekatan dengan permukiman masyarakat, tepatnya berada di Kelurahan Bukit Merdeka.		
10	Tuntutan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabang terhadap PT. Bayan Group Pemerintah Desa di Kecamatan Tabang, menuntut agar PT. Bayan Group dapat memberikan CSR secara merata diseluruh desa di kecamatan Tabang, tidak hanya di desa Gunung Sari, desa-desa yang lain memerlukan Solar Cell untuk penerangan jalan, banyak jalan-jalan desa dan gedung sekolah yang rusak. Sehingga para pemerintahan desa menyampaikan tuntutan agar PT. Bayan Group dapat memberikan CSR secara merata diseluruh desa di kecamatan Tabang.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dengan perusahaan, yang mengakibatkan terganggunya operasional perusahaan. 2. mendorong DPRD untuk dapat menjembatani pertemuan antara Perusahaan dengan Pemerintahan Desa agar beberapa keinginan bisa diakomodir oleh perusahaan. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
11	Lahan Warga L3 belum digantirugi oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) Warga L3 menuntut kepada Jembayan Muara Bara (JMB) untuk segera melakukan gantirugi lahan-lahan warga desa Mulawarman Dusun Karya Harapan, karena itu warga meminta advokasi kepada Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur untuk menyampaikan keluhan kesah dan tuntutan mereka. MenurutForum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur bahwa PT Jembayan Muara Bara atas pemasalahan penyerobotan lahannya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa penyerobotan lahan merupakan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain tanpa mengindahkan konsekuensi hukum dan aturan yang berlaku. Dalan UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 dan Pasal 36 telah mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dengan perusahaan. 2. melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti tuntutan warga L3 desa Mulawarman. 3. mendorong kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat surat teguran kepada PT JMB terkait kegiatan PT JMB di lahan masyarakat Desa Mulawarman. 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	kegiatannya wajib mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
12	Konflik Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura Beredarnya Surat Keputusan (SK) Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Nomor : 001/SK-1/SKKM/X/2023.dikeluarkan 1 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Adji Mohammad Arifin tersebut menetapkan pencabutan gelar bangsawan kesultanan, gelar Pangeran Hario Kesumo Poeger dari Adji Azuar Poeger, dan gelar Pangeran Hario Kesuma Poeger dikembalikan ke keraton. Adji Azuar Poeger mengatakan bahwa dirinya yang diamanahkan oleh Sultan Almarhum Salehuddin II yang memberikan gelar kepada dirinya menggantikan gelar orang tuanya almarhum Adji Pangeran Hario Kesumo Poeger. Konflik bermula dengan adanya surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan sultan Adji Mohammad Arifin selaku Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura XXI oleh kerabat keturunan Aji Pangeran Hario Kesumo Poeger bin Adi Mohammad Parikesit.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar pendukung kerabat kerajaan. 2. membuat telaahan staf yang disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, agar Bupati Kutai Kartanegara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan untuk menjaga kondusifitas daerah dan kehidupan sosial budaya di Kutai Kartanegara. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

13	Konflik Pembebasan Lahan Warga Desa Teluk Bingkai oleh PT. ABK Lahan Warga Desa Teluk Bingkai belum diselesaikan PT. Agro Bumi Kaltim (ABK) sehingga warga menghentikan truk-truk pengangkut hasil sawit. Warga menuntut kejelasan ganti rugi lahan yang digarap oleh PT.ABK, warga meminta mediasi dengan PT.ABK dan PT. Evans Indonesia untuk menyelesaikan tuntutan warga.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar pendukung 2. mengkoordinasikan kepada Dinas Perkebunan untuk dapat menindaklanjuti permasalahan dengan mempertemukan perusahaan dengan warga. 3. Meminta kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengumpulkan data bukti pendukung kepemilikan lahan, dan meminta masyarakat tidak berbuat anarkis dan melanggar hukum 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
14	Klaim Lahan dilokasi SMP YPK Tenggarong Lahan SMP YPK Tenggarong yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Panji Tenggarong diklaim oleh Ahli Waris Alm. Abd. Majid M, Gufran Majid menuntut kepada pihak Yayasan SMP 1 YPK agar mengosongkan lahan yang di klaim sebagai milik ahli Waris dari bapak Alm. Abd. Majid M, Gufran Majid Perkara yang dimenangkan Ahli Waris berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung RI putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3278/PDT/1996 tanggal 27 Juni 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 1996. sangat mutlak hak sepenuhnya Ahli Waris. berdasarkan putusan tersebut, dengan ukuran 50m x 133m = 6,650 M2 Ahli waris menuntut pembayaran gantirugi lahan kepada pembuat sertifiat diatas lahan tersebut yakni SMP YPK dan 20 nama pemilik sertifikat diatas lahan milik ahliwaris. hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada upaya tergugat untuk membayar gantirugi yang sesuai, maka ahlwaris memiminta pengosongan lahan tersebut.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar wraga dan ahliwaris 2. mengkoordinasikan kepada pihak terkait dengan proses mediasi. 3. Meminta satpol PP dapat mengawasi semua pergerakan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

Rekapitulasi Data

Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak)						2							2
2	Penanangan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA	1											1	2
3	Penanganan Prostitusi dan penyakit masyarakat													0
4	Penanganan Kepegawaian ASN/THL/Staf Desa/Kel Kab. Kutai Kartanegara													0
5	Penanganan Konflik Antar Umat Beragama						4							4
6	Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial			2										0
7	Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll)													0
8	Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan													-
	- Melibatkan Ormas/LSM													-
	- Hanya Kelompok Masyarakat			2		1	1				2			6
9	Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik							1						1
10	Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal													
11	Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal			1					1					2
12	penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat	1	1	3										5
13	Pemantauan dan Penggalangan Napiter													0
14	Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha													0
15	Penanganan yang mengarah pada konflik SARA	1			1									2
16	Rakor Tim Pakem Kukar												1	1
17	Rakor Penanganan Konflik													
	- Politik													0
	- Lahan SDA / Pertambangan													0
	- Kewaspadaan													0
	- Sosial Budaya			1	2									3
	- Ketenaga Kerjaan													0
Jumlah Penanganan Konflik Sosial		6	6	7	4	1	6	1	2	0	2	0	2	31

Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Penanganan Aspirasi Politik	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Konflik Pilkades									1				1
2	Sengketa Partai Politik dan Pemilu	1					1		1					3
Jumlah Penanganan Aspirasi Politik		1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran
Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang	1,78%	1,41%	1,64%	2,19%
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,21%	0,96%	1,25%	1,77%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, semuanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dan meningkat dari tahun sebelumnya, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

- a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. Bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
2. Terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI
3. Revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila
4. Secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
5. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarnya bangsa.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan

Dalam hal ini Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan yang dilakukan di 18 kecamatan yaitu Pembinaan Pembauran Masyarakat, Pembinaan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan, serta sosialisasi FPK dan KPU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis. Dalam hal pencapaian pada indikator ini yang merupakan hal mendasar adalah pada tingkat kehadiran dan pemahaman peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Indikator II : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesbangpol berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada tahun 2020 jumlah kasus bisa turun hingga 205 kasus karena dari tahun 2012 jumlah 186 kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161, namun pada tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 kasus dan tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 kasus selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 kasus dan pada tahun 2017 telah menurun menjadi 469 kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 kasus dan pada tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkoba, hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi "Operasi Bersinar" sehingga pada tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan

bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunnya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 tahun 2013 Badan Kesbangpol menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan bekerjasama dengan BNK dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Dan setelah penyuluhan dilaksanakan Tes Urin kepada para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukkan negative dalam pemakaian narkoba.
2. Pelaksanaan Tes Urin bagi para aparatur Badan Kesbangpol dalam 2 tahun berturut-turut, dengan harapan para aparatur bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan Tes Urin bebas narkoba.

Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara :

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023
1	Narkoba	224	178	239
2	Pembunuhan	3	3	-
3	Kejahatan Seksual	1	3	2
4	Penganiayaan	22	32	15
5	Pencurian	17	36	16
6	Eksplorasi Anak Bawah Umur	24	25	15
7	Premanisme	0	5	6
	JUMLAH	291	282	293

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 293 kasus, telah terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus dari tahun 2022 dengan target jumlah kasus sebanyak 282 kasus, penurunan kasus ini merupakan suatu capaian yang cukup baik, untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Selain penyakit masyarakat, dalam hal ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB se – Kaltim serta sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah dan Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%	11,04%	11,90%	14,76%
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	9,9%	7,9%	8,8%	9,8%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase ormas yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya ormas yang difasilitasi pada tahun 2023, sementara 1 (satu) indikator telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari dua indikator tersebut :

a. Indikator I : Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2015 – 2020 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2019 sebesar 81,24 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang pontensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apati)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyentuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

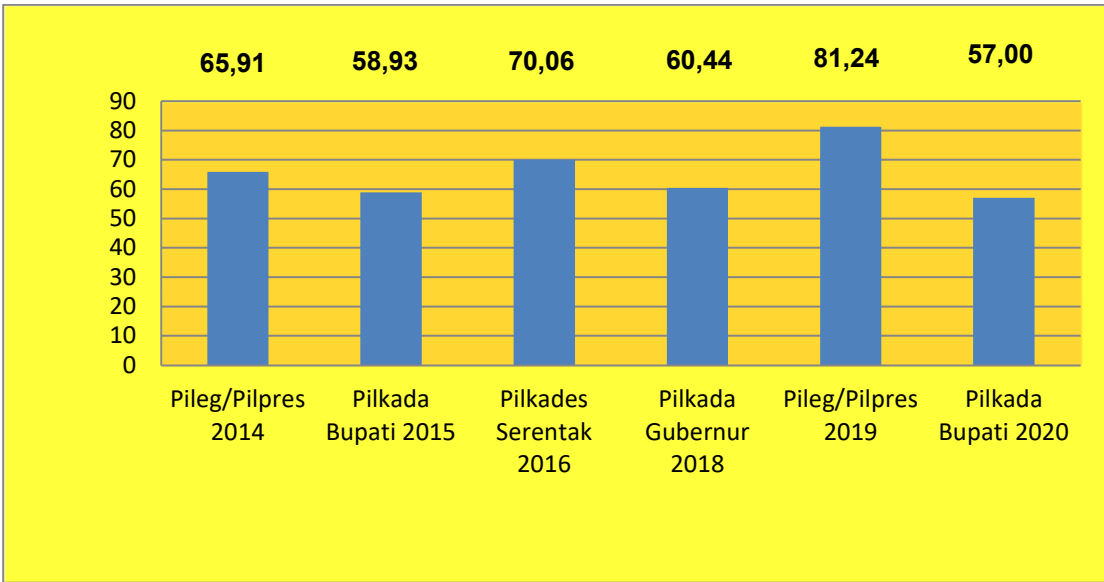
Ini adalah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih di atas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilukada Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpre 81,24	Pilbup 57,00

GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Terkait dengan parpol pada fasilitasi bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2023, seluruh parpol telah diverifikasi dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dan persyaratan verifikasi. Pada tahun 2019 proses bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan bagi parpol hasil Pemilu Legislatif periode tahun 2019-2024 terdapat 10 (sepuluh) Parpol.

Secara keseluruhan untuk parpol berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara parpol yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol, selain itu Badan Kesbangpol akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap parpol tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PERIODE 2019-2024

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-					
NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5 Kursi	34.286 Suara	130.286.800	Lengkap
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7 Kursi	46.667 Suara	177.334.600	Lengkap
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7 Kursi	45.361 Suara	172.371.800	Lengkap
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13 Kursi	95.345 Suara	362.311.000	Lengkap
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2 Kursi	20.373 Suara	77.417.400	Lengkap
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3 Kursi	23.250 Suara	88.350.000	Lengkap
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1 Kursi	14.340 Suara	54.492.000	Lengkap
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 Kursi	16.764 Suara	63.703.200	Lengkap
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 Kursi	34.071 Suara	129.469.800	Lengkap
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 Kursi	12.410 Suara	47.158.000	Lengkap
JUMLAH		45 Kursi	342.867 Suara	1.302.894.600	

Dari 16 Partai Politik pada 2019 menjadi 10 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, ada 10 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan tahun 2023.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dan telah tercapai 100%, meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang didapat oleh Parpol. Agar parpol dan ormas bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Bimtek bagi Bendahara Parpol dan Ormas pada tahun berikutnya.

b. Indikator II : Persenstase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 9,9% dengan realisasi 9,8%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada tahun ini ormas yang mendaftar sama dengan tahun 2022 sebanyak 17 ormas dan 21 ormas pada tahun 2023, meskipun demikian, ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 ormas, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Bdan Kesbangpol memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar
tahun 2018 – 2023

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14
2.	OKP	-	-	-	-	4	
3.	LSM	-	2	-	2	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar tahun 2023 (berdasarkan sebaran di kecamatan)									
No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Lemb. Adat	Profesi	Yayasan	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	2	-	-	-	-	-	-	0
4	Muara Jawa	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Sanga-sanga	1	-	-	-	-	-	-	0
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Tenggarong Seberang	-	-	-	-	-	1	-	0
10	Tenggarong	11	-	-	-	1	-	4	21
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Muara Kaman	-	-	-	-	-	-	1	0
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		14	0	0	0	1	1	5	21

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen PerencanaanStrategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini DenganTarget
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,50 Nilai	42,75	64,88%
Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	17 kejadian	14 kejadian	100%
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,92 %	3,99%	100%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,71 %	5,71%	100%

3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Efisiensi PenggunaanSumber Daya

SasaranStrategis	Indikator kinerjaSasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	CapaianRealiasai Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	67,32%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,87%	0%	Target kinerja tidak tercapai
Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan jumlah konflik dan gejolak	132%	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	67,60%	64,40%	
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	126,89%	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	97,03%	29,86%	
			Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	72,32%	54,57%	
Pemahaman Masyarakat Terhadap Wasbang dan Pancasila	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	133,44%	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	96,79%	36,65%	
			Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	75,36%	58,08%	
RATA-RATA		96,83		93,28	40,59	

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA :**1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga porsi besar pada belanja perjalanan dinas, dimana dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas telah dilakukan pada lokasi yang dianggap rawan konflik dan gejolak, kemudian untuk personel yang ditugaskan juga dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan monitoring

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga porsi besar pada belanja perjalanan dinas, dimana dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas telah dilakukan pada lokasi yang dianggap penting terkait data perkembangan politik, kemudian untuk personel yang ditugaskan juga dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan monitoring.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga porsi besar pada belanja perjalanan dinas, dimana dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas telah dilakukan pada lokasi yang dianggap penting terkait data verifikasi Ormas, kemudian untuk personel yang ditugaskan juga dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan monitoring.

4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, namun hal ini telah dilakukan antisipasi dari pengeluaran yang banyak dengan pembatasan jumlah peserta

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, namun hal ini telah dilakukan antisipasi dari pengeluaran yang banyak dengan pembatasan jumlah peserta.

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%	Keterangan / Rumus Penghitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Persen	100	100	100	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan dikali 100	Seluruh hasil temuan sudah ditindaklanjuti melalui Surat Tanda Setor (STS)
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	Jumlah pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan BMD dibagi Jumlah BMD di Pengguna Barang di kali 100	Seluruh pelaksanaan dan pelaporan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100	Jumlah pengelolaan pengadaan dibagi jumlah pengadaan dikali 100	Seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Jumlah Pejabat yang mengisi LHKPN dibagi jumlah pejabat	Para pejabat secara keseluruhan telah memberikan data LHKPN untuk diinput dan admin pada badan kesbangpol telah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%	Keterangan / Rumus Penghitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)						dikali 100	melaksanakan tugasnya tepat waktu
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	Jumlah ASN yang mengisi LHKASN dibagi jumlah ASN dikali 100	Para ASN secara keseluruhan telah memberikan data LHKASN untuk diinput dan admin pada badan kesbangpol telah melaksanakan tugasnya tepat waktu
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	78,10	100	Predikat kearsipan berdasarkan hasil evaluasi	Pelaksanaan pengelolaan kearsipan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim evaluasi dan diharapkan kedepannya nilai pengelolaan arsip dapat meningkat sesuai dengan target dan Pembuatan Record Center yang baru masih dalam proses
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	persen	100	100	100	Jumlah data terisi dibagi jumlah seluruh elemen data yang harus diisi	Seluruh elemen data sudah terisi pada tahun 2023
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Jumlah inovasi yang dibuat	Inovasi "FORKOPIMDA MENDENGAR"
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	persen	100	97,99	97,99	Jumlah capaian output kegiatan dibagi Jumlah output kegiatan	Terdapat kegiatan pada bidang sosbud yang tidak terlaksana dikarenakan penyesuaian jadwal pimpinan
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	persen	100	97,99	97,99	Jumlah realisasi fisik dibagi Jumlah target fisik	Terdapat kegiatan pada bidang sosbud yang tidak terlaksana dikarenakan penyesuaian jadwal pimpinan
	Persentase realisasi keuangan	persen	100	93,28	93,28	Jumlah realisasi keuangan dibagi Jumlah pagu anggaran	Terdapat belanja sisa kegiatan yang sudah tidak dapat direalisasikan
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	laporan	2	2	100	Ketepatan Waktu Pelaporan	Pelaporan Manajemen Resiko telah dibuat dan diserahkan tepat waktu
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	dokumen	1	1	100	Jumlah dokumen reviu IKU	IKU telah dilakukan reviu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%	Keterangan / Rumus Penghitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
daerah sesuai dengan data terkini							
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	kegiatan	4	4	100	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Pelaksanaan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	persen	100	100	100	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN yang wajib mengikuti pengembangan kompetensi	Seluruh ASN yang wajib telah mengikuti pengembangan kompetensi
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	poin	100	100	100	Jumlah poin KTR	Telah dipasang himbauan kawasan tanpa rokok di setiap ruangan kantor

3.2 REALISASI ANGGARAN

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Pada tahun 2023 Total Anggaran belanja Badan Kebangpol Rp. 65.381.761.672,00 yang meliputi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (APBD-P). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 60.986.269.805,00 (93,28%) pada tahun ini mengalami peningkatan penyerapan anggaran dari tahun 2022 sebesar 9,42%. Dimana pada tahun 2022 penyerapan anggaran sebesar 83,86% (termasuk belanja gaji dan tunjangan) Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Data Pengelolaan Keuangan OPD Tahun 2023

No	Fokus	Jenis Data	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
1.	Alokasi Anggaran Kesbangpol	Total Anggaran SKPD (Belanja Operasi)	65.381.761.672,00	60.986.269.805,00	4.395.491.867,00	93,28
2.		Besaran Belanja Pegawai	7.845.939.088,00	6.934.831.698,00	911.107.390,00	88,39
3.		Besaran Belanja Barang dan Jasa	17.375.797.077,00	13.928.617.600,00	3.447.179.477,00	80,16
4.		Besaran Belanja Hibah	39.120.505.507,00	39.120.505.507,00	0,00	100,00
5.		Besaran Belanja Modal	1.039.520.000,00	1.002.315.000,00	37.205.000,00	96,42

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.993.973.109	10.899.491.663	1.094.481.446	90,87
1			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.347.000	98.000.900	9.346.100	91,29
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.779.699.088	6.864.791.698	914.907.390	88,24
3			Administrasi Barang Milik	40.800.000	40.800.000	-	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
			Daerah Pada Perangkat Daerah				
4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	402.740.000	379.000.000	23.740.000	94,11
5			Admistrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.159.700	1.427.020.819	47.138.881	96,80
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.377.000	1.066.815.000	39.562.000	96,42
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.271.303	524.236.896	14.034.407	97,39
8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.579.018	498.826.350	45.752.668	91,60
	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.777.086.056	1.877.173.360	899.912.696	67,60
9			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.777.086.056	1.877.173.360	899.912.696	67,60
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	44.517.786.507	43.195.733.971	1.322.052.536	97,03
10			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	44.517.786.507	43.195.733.971	1.322.052.536	97,03

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
			Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	298.000.000	215.500.000	82.500.000	72,32
11			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	298.000.000	215.500.000	82.500.000	72,32
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.012.630.000	1.948.079.962	64.550.038	96,79
12			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.012.630.000	1.948.079.962	64.550.038	96,79
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	3.782.286.000	2.850.290.849	931.995.151	75,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
13			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	3.782.286.000	2.850.290.849	931.995.151	75,36
			JUMLAH	65.381.761.672,00	60.986.269.805,00	4.395.491.867,00	93,28

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan TahunSebelumnya (2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.412.173.362,00	9.531.902.457,00	1.880.270.905,00	83,52
1			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.768.000,00	67.018.776,00	6.749.224,00	90,85
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.596.478.485,00	7.052.324.377,00	1.544.154.108,00	82,04
3			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100
4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	9.300.000,00	10.700.000,00	46,50
5			Admistrasi Umum Perangkat Daerah	808.099.300,00	797.857.241,00	10.242.059,00	98,73
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.172.000,00	152.744.000,00	240.428.000,00	38,85
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.382.777,00	480.095.759,00	27.287.018,00	94,62
8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	972.472.800,00	931.762.304,00	40.710.496,00	95,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
			Urusan Pemerintahan Daerah				
	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.822.876.500,00	1.769.394.904,00	1.053.481.596,0	62,68
9			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.822.876.500,00	1.769.394.904,00	1.053.481.596,0	62,68
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.487.095.800,00	3.185.803.349,00	301.292.451,00	91,36
10			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.487.095.800,00	3.185.803.349,00	301.292.451,00	91,36
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	193.817.000,00	6.183.000,00	96,91
11			Perumusan Kebijakan Teknis dan	200.000.000,00	193.817.000,00	6.183.000,00	96,91

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
			Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaa n dan Pancasila Serta Ormas	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.650.000.000,00	1.452.536.605,00	197.463.395,00	88,03
12			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.650.000.000,00	1.452.536.605,00	197.463.395,00	88,03
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2.458.230.000,00	2.341.323.056,00	116.906.944,00	95,24
13			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	2.458.230.000,00	2.341.323.056,00	116.906.944,00	95,24
			JUMLAH	22.030.375.662,00	18.474.777.371,00	3.555.598.291,00	83,86

PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN
SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis I :				Program :		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai	95,20 Nilai	100	11.993.973.109	10.899.491.663	90,87
Sasaran Strategis II :				Program :		
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	2.777.086.056	1.877.173.360	67,60
Sasaran Strategis III :				Program :		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	2,19%	123	2.012.630.000	1.948.079.962	96,79
				Program :		
				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,21%	1,77%	146	3.782.286.000	2.850.290.849	75,36
Sasaran Strategis IV :				Program :		
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%	14,76%	127	44.517.786.507	43.195.733.971	97,03
				Program :		
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	9,9%	9,8%	98,99	298.000.000	215.500.000	72,32

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 65.381.761.672,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2023 : Rp. 60.986.269.805,00 (93,28)

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 rata-rata sebesar 96,83% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol sebesar 67,32% (Sedang).
- 2) Capaian kinerja Penurunan jumlah konflik dan gejolak sebesar 132%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi sebesar 126,89%. (Sangat Tinggi).
- 4) Capaian kinerja Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas sebesar 133,44%. (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 96,52% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,31%

LKjIP tahun 2023 merupakan kelanjutan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Penyajian data LKjIP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan :

1. Capaian sasaran yang belum berhasil, selain karena kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan target dapat tercapai dengan baik.
3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.
4. Pada sasaran yang tidak tercapai seperti persentase ormas yang tertib administrasi akan dilakukan perbaikan ke depannya

4.2 PERBAIKAN KEDEPAN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023, dapat disarankan perbaikan sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2024, khususnya pada peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan tentang pendidikan politik masyarakat;
2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya;
3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;

4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap unit kerja, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing Kepala Bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai;
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.3 SUMBER DATA KINERJA

Adapun sumber data kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil monitoring dan evaluasi tim internal Badan Kesbangpol
2. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
3. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara
5. POLRES Kutai Kartanegara
6. KODIM 0906 Tenggarong
7. BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur
8. Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Kaltim

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023. Pencapaian hasil dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan datang.

Tenggarong, 23 Februari 2024



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691226 200112 2 002